

Jokowi Targetkan Sistem Informasi Online RS Selesai Sebulan

Laporan:

Kamis, 21 February 2013 | 14:31 WIB



Mengapa Jokowi Jarang
Memanggil Konsultan kebijakan
dan Membuat Projek Kesehatan?

Karena dia merasa masalah-masalah
itu bukan masalah kebijakan, tetapi
masalah manajemen

Topik Ini: Mengapa

Keterampilan membuat kebijakan di Program MPH

1. Tekanan pada pendekatan rasional – producing policy document
2. Lack of management practice dalam pendidikan
3. The need to learn from realities rather than from the book.
4. The theories relevant to study Indonesian policy making process

Isi

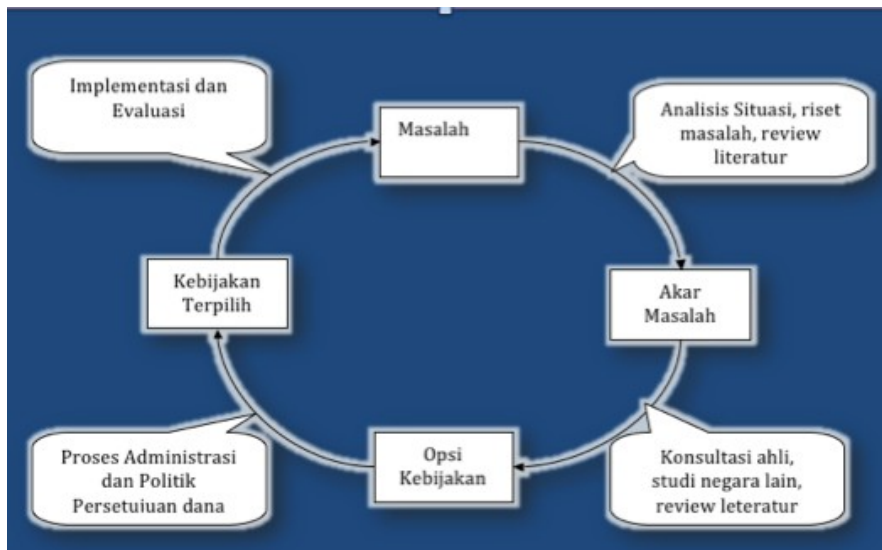
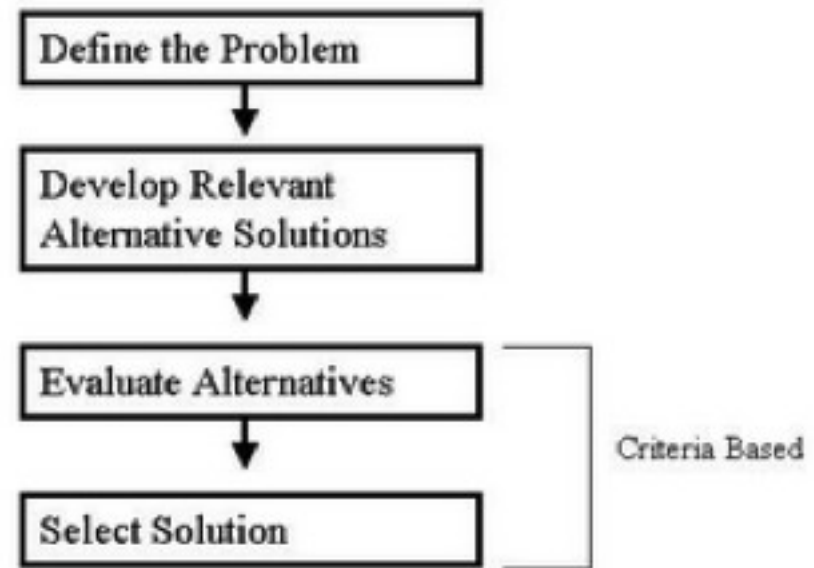
1. Rational Policy Making: What Happen?
2. Non-rational Policy Making: Politik atau Science?
3. Health Policy di Masa Jokowi
4. Lessons learned

Rational Policy Making



Rational Decision Making Process

Beaufort B. Longest, *Health Policymaking in the United States, 2nd Edition*, Health Administration Press, 1998



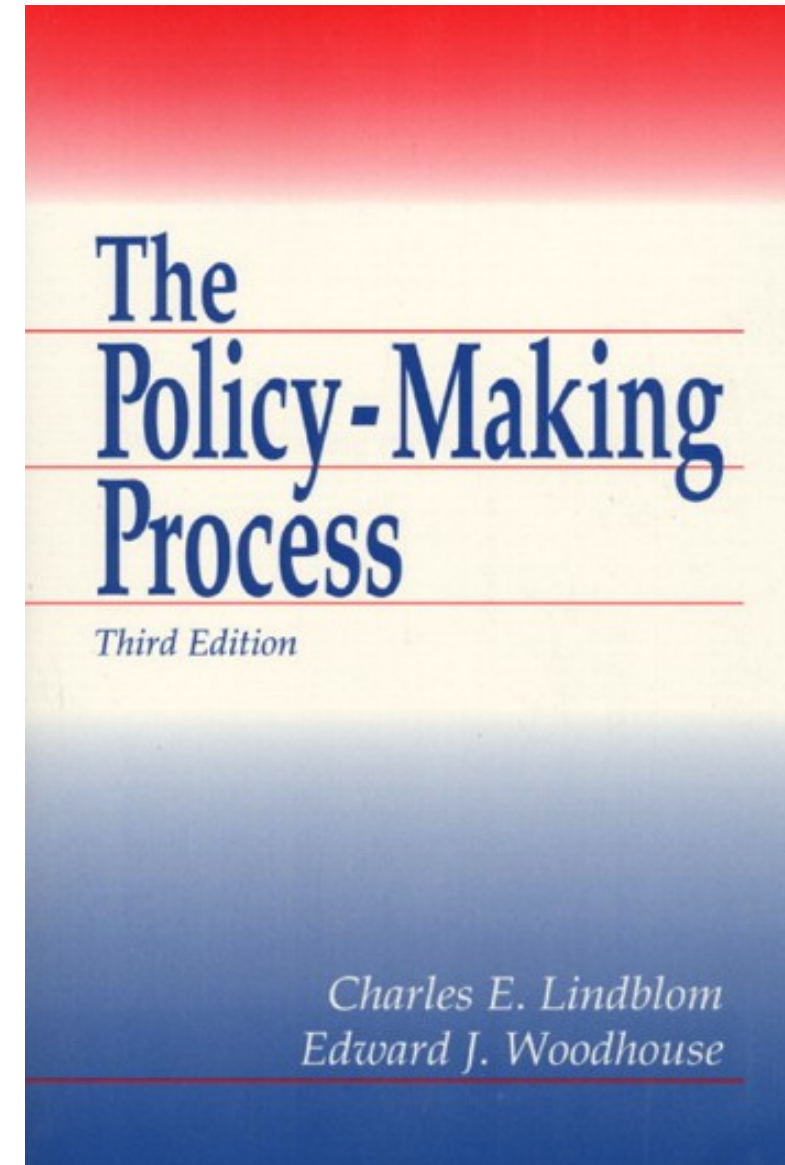
Tabel 4 Tahap dalam Siklus Kebijakan

Tahap	Kegiatan	Produk
Analisis Situasi	Riset, identifikasi masalah, literatur	Need and problem analysis document.
Pengalaman Program yang Efektif sebelumnya	Studi literatur, perbandingan antar negara, konsultasi ahli, belajar dari kesalahan pengalaman yang lalu	To change technical proposal into administrative proposal
Penetapan Kebijakan	Proses administratif dan politik: Advocacy, lobby and negotiation.	Political acceptance
Implementasi dan evaluasi	Pilot study, local capacity development, operational management.	Jurang antara kebutuhan terisi. Health service delivery

Why Rational tidak Jalan?

Policy tidak rasional terjadi karena komunitas kebijakan yang saling memperjuangkan kepentingan mereka

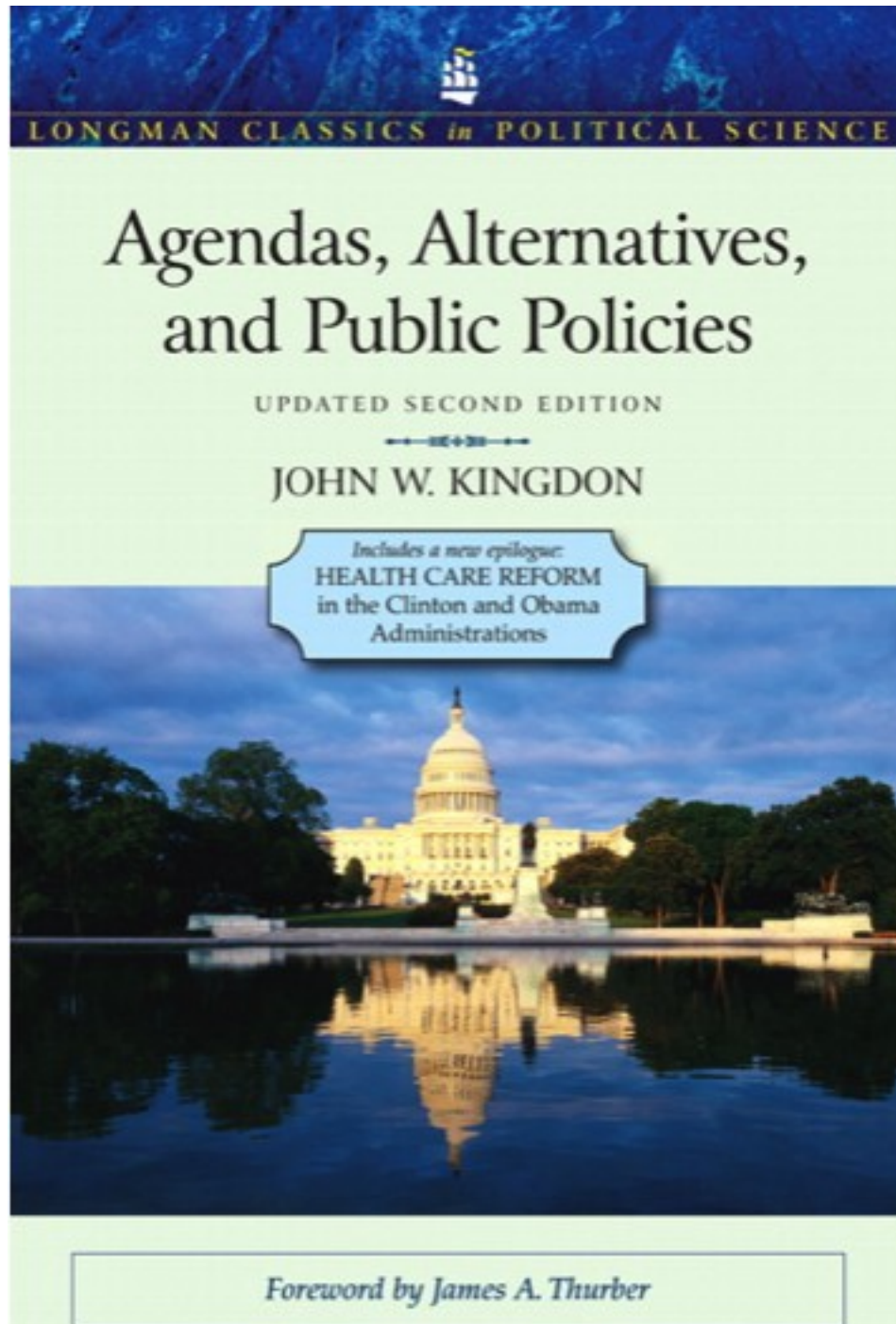
(Lindblom 1959)



Apple
<http://www.apple.com/>

The Science of Muddling Through

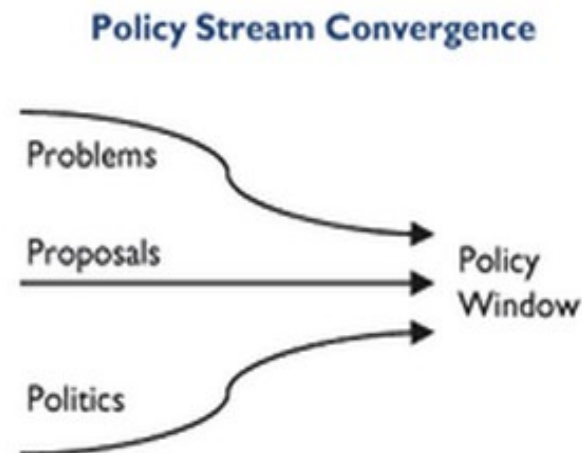
<i>Rational-comprehensive (Root)</i>	<i>Successive limited comparisons (Branch)</i>	<i>Branch strategies</i>
<i>1 Clarification of objectives distinct from and precedes analysis of alternative policies.</i>	<i>Selection of goals and analysis of needed action are closely intertwined.</i>	<i>Chooses values + policies, focusing on incremental values.</i>
<i>2 Policy formulation is by means-end analysis.</i>	<i>Means-end analysis is often inappropriate or limited.</i>	<i>Means + ends simultaneously.</i>
<i>3 Test of a 'good' policy is that it can be shown to be the most appropriate means to desired ends.</i>	<i>Test of a 'good' policy is typically that various analysts find themselves agreeing on a policy.</i>	<i>Agreement on a policy despite disagreement on values.</i>
<i>4 Analysis is comprehensive.</i>	<i>Analysis is drastically limited.</i>	<i>Incremental simplifications.</i>
<i>5 Theory is often relied upon.</i>	<i>Succession of comparisons reduces or eliminates need for theory.</i>	<i>Small adjustments avoid risk and error.</i>



Kingdon

Policy Window (1)

- Ada tiga aliran pikiran tentang masalah, solusi, dan politik sedang berjalan bersama-sama.
- Policy entrepreneur mencari titik singgung satu dan lain stream.
- Ketika ada singgungan itu, seolah-olah ada jendela yang menghubungkan satu dengan yang lain.

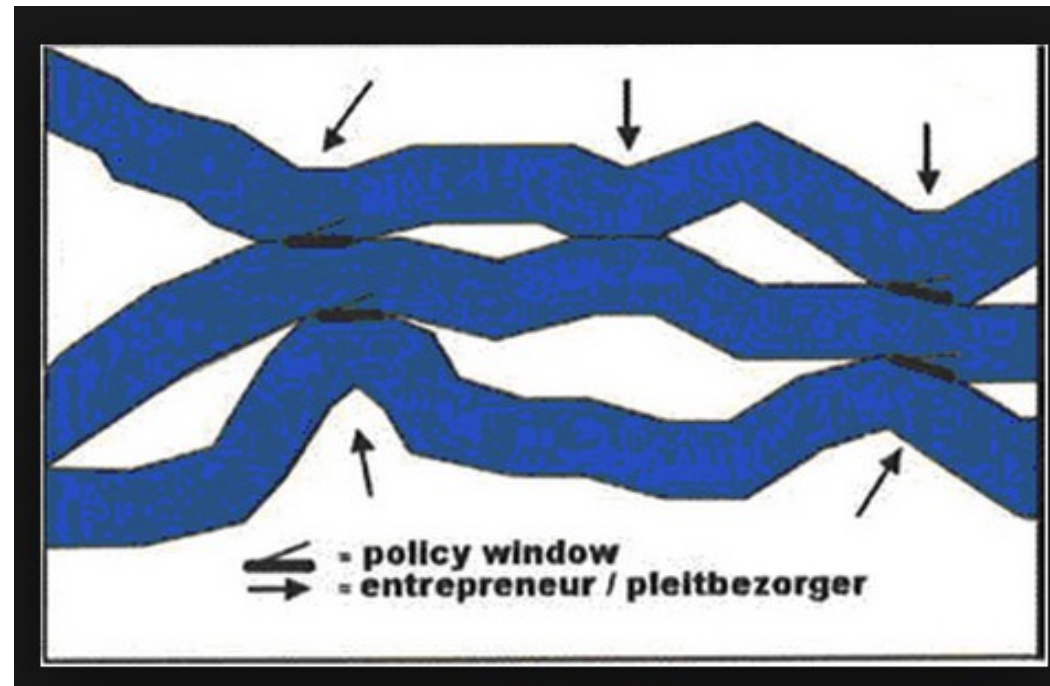


Policy Window (2)

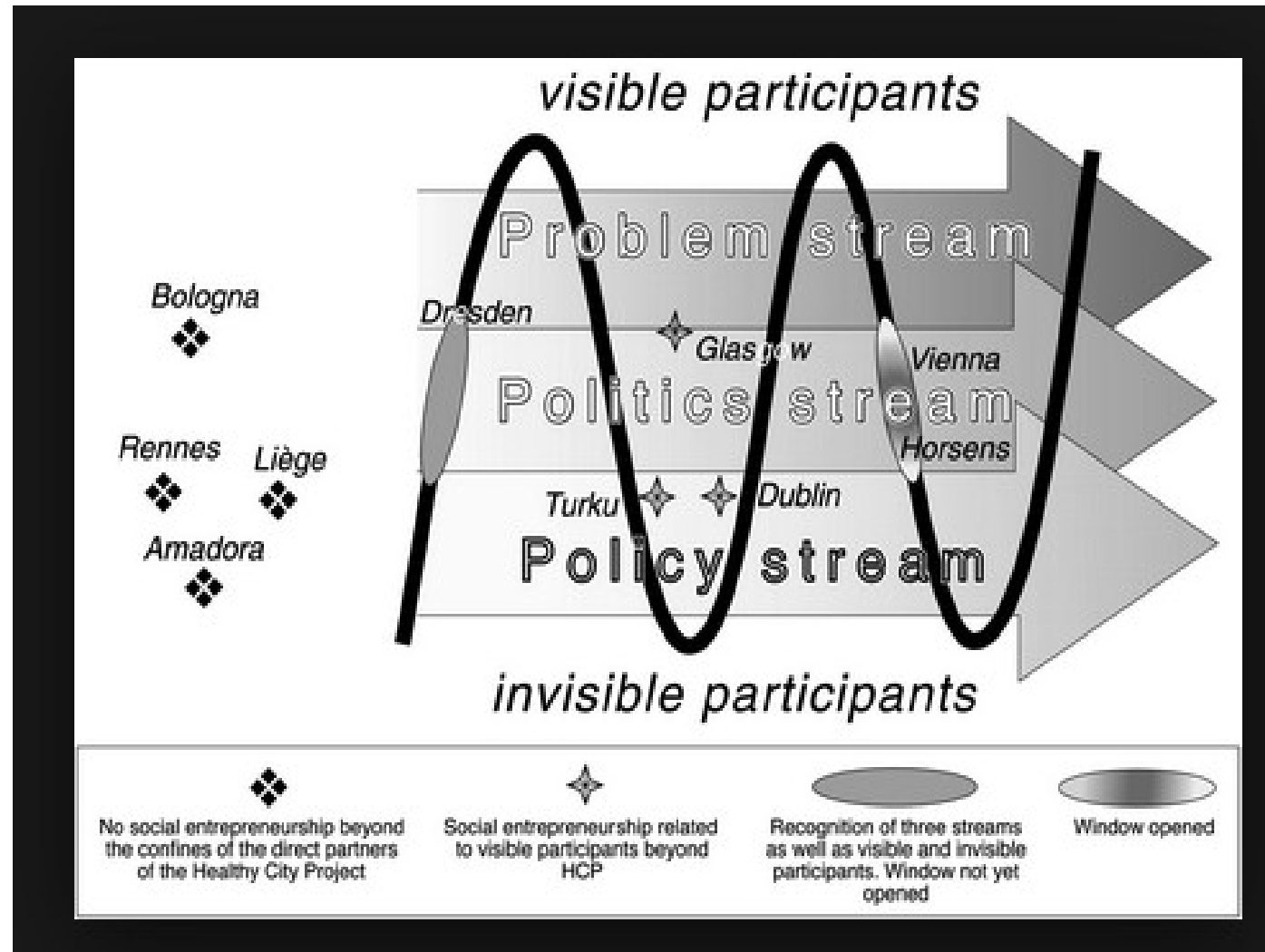
- Ada tiga aliran terdiri masalah (paling mudah terlihat), politik, dan solusi (tidak kelihatan)
- Solusi ada di paling bawah.
- ada momentum yang berjalan melintasi tiga aliran itu.
- policy window merupakan titik ketika aliran itu biasanya berada di stream politik

(Kingdon 1995)

Gambaran Policy Window



Contoh Penerapan



Manajemen, Kebijakan, Politik

Political management of public health problem (Shiffman 2003).

Susah sekali mengangkat masalah kesehatan dalam politik.

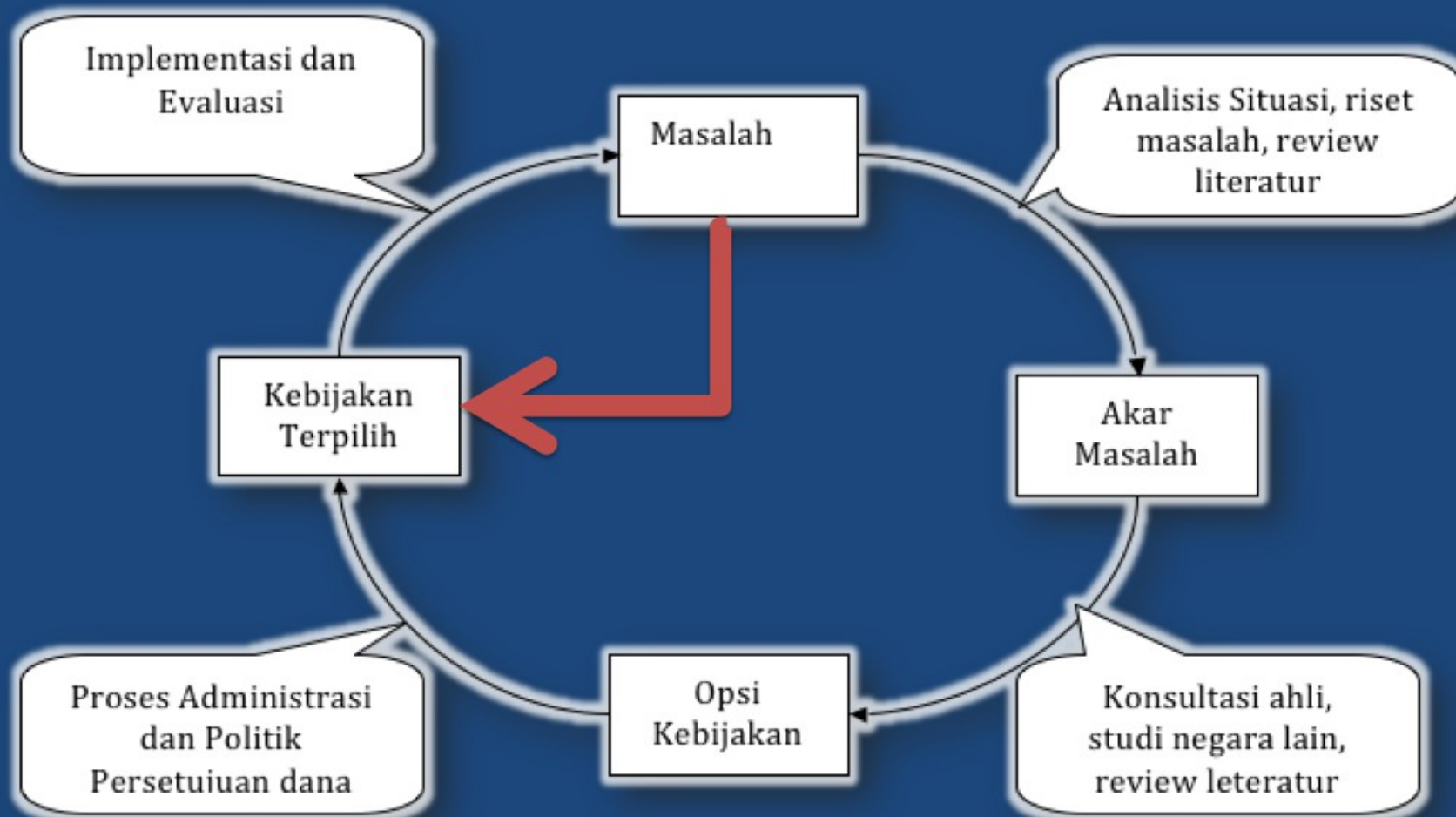
Pentingnya policy entrepreneur.

Bupati yang mewakili rakyat (Suryati, Hasanbasri, and Padmawati 2012)

Politik kesehatan ditandai pencitraan dan problem solving juga (Rosser, Willson, and Sulistiyanto 2011)

Peran bupati di tabanan: back up dari partai politik (Arifanto et al. 2005)

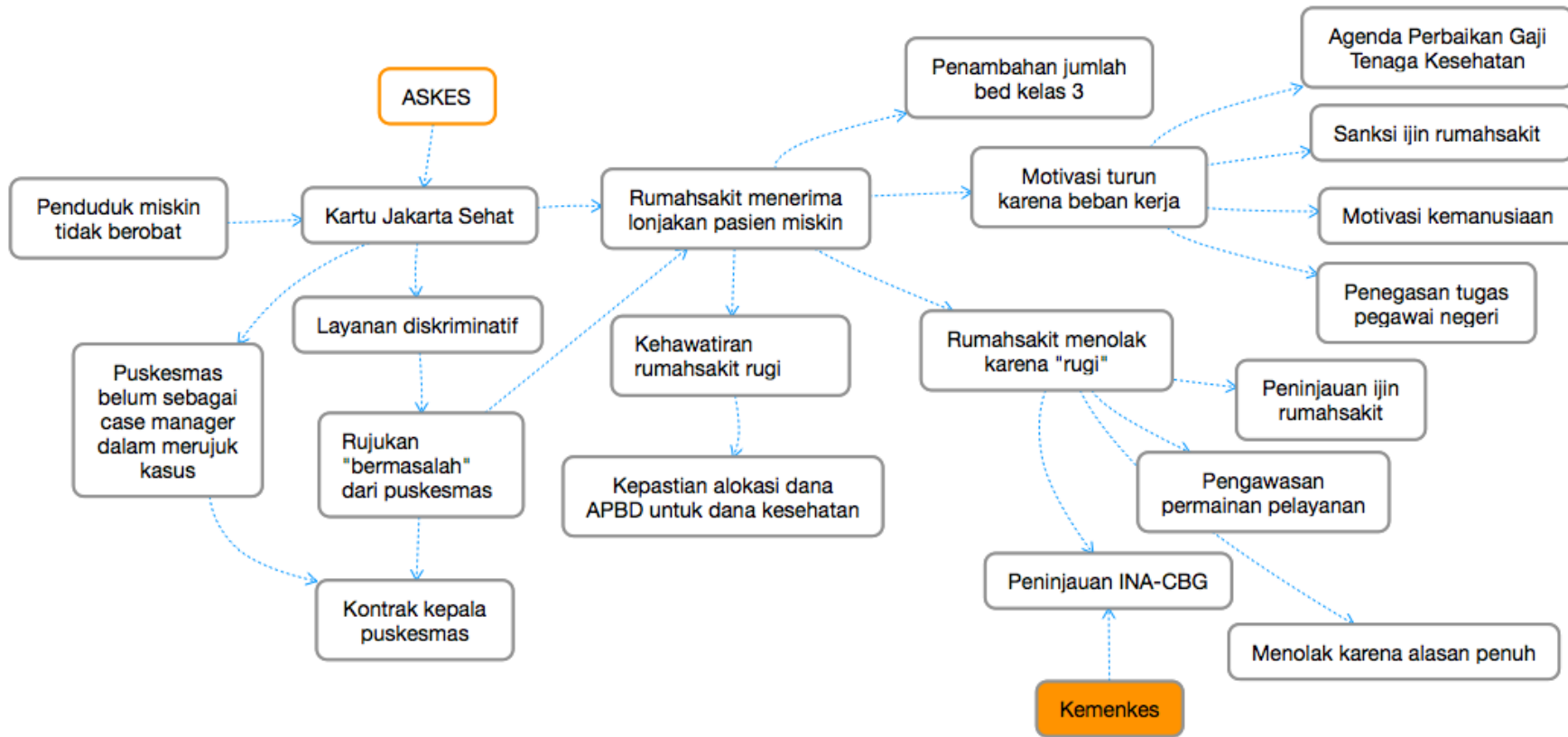
Policy Making Process: Pendekatan Manajemen



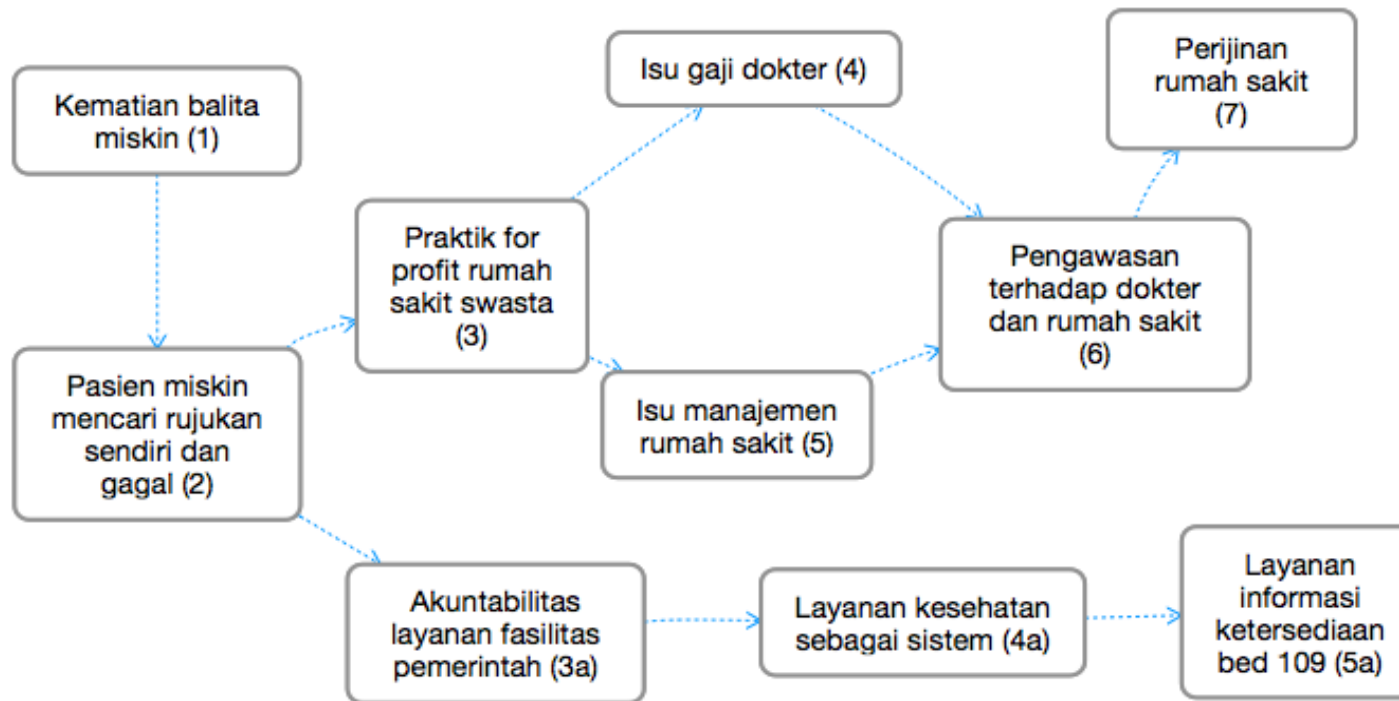
Hasil

- Dari kartu sehat – ina cbg – gaji dokter – kontrak kepala puskesmas
- Kematian balita miskin – keterbukaan rumahsakit pemerintah, perijinan rumahsakit swasta, dan sistem regional rumahsakit

(1) Dari Kartu Sehat ke ...



(2) Dari kematian balita miskin ke



Lessons Learned

Tekanan pada siapa yang menderita bukan penyakitnya. Yang mengurus penyakit adalah dokter. Ia peduli dengan hal-hal yang menjadi urusan para manajer

Jokowi dan Ahok memiliki argumen manajerial yang jelas terhadap isu kebijakan. Setiap pilihan yang diambil memiliki arah yang strategis bagi pengembangan sistem.

Pemerintah daerah kadang latah mengikuti pola proyek. Mereka senang bekerja jika ada proyek. Jokowi dan Ahok tak tampak mengikuti pola proyek ini.

Perlu Dibahas

Policy entrepreneur dan policy windows (Kingdon 1995)

Policy is not producing a document

– it is to implement (garbage can model)

Weak points & system strengthening (Roberts et al. 2004)

Policy is not thinking first (Mintzberg and Westley 2010)

Teknokrat mengelola politisi agar mengagendakan public health.

Jokowi justru sebaliknya (Shiffman 2004)

Kesimpulan

- Jokowi's response to health issues fit garbage can model of policy making process.
- Policy is to opt solution that fit specific management situation.
- The key to successful policy making is to do good management
- The key is to understand the right management problem
- Good entrepreneurs seems to be good policy makers

So What?

1. Membahas teori *rational* dan *non-ratioional policy making* harus betul membaca kenyataan lapangan.

2. There is no right policy – tetapi apa yang bisa berjalan di lapangan itulah "kebijakan".

Karena itu pengajaran tentang kebijakan di program-program MPH perlu menjadi perhatian serius agar non-rational policy making tidak dianggap sebagai pendekatan yang "salah"

Referensi

- Arifanto, Alex, Ruly Marianti, Sri Budiyati, and Ellen Tan. 2005. *Making Services Work for the Poor in Indonesia: A Report on Health Financing Mechanisms in Kabupaten Tabanan, Bali*.
- Kingdon, JW. 1995. "Agenda, alternatives and public policy." *Boston: Little, Brown*.
- Lindblom, C. E. 1959. "The science of 'muddling through'." *Public administration review* 19(2):79–88.
- Mintzberg, H., and F. Westley. 2010. "Decision making: it's not what you think." *Handbook of decision making* 42:89–93.
- Roberts, M., W. Hsiao, P. Berman, and M. Reich. 2004. "Getting health care reform right."
- Rosser, Andrew, Ian Willson, and Priyambudi Sulistiyanto. 2011. "Leaders, Elites and Coalitions: The Politics of Free Public Services in Decentralised Indonesia." *DEVELOPMENTAL LEADERSHIP PROGRAM Research Paper* 16.
- Shiffman, Jeremy. 2003. "Generating political will for safe motherhood in Indonesia." *Social science medicine* 56(6):1197–1207.
- Shiffman, Jeremy. 2004. "Political management in the Indonesian family planning program." *International Family Planning Perspectives* 30(1):27–33.
- Suryati, Siti, Mubasysyir Hasanbasri, and Retna Siwi Padmawati. 2012. "Benarkah Rumahsakit Pemerintah Menggunakan Manajemen Keluhan Pasien untuk Melindungi Pembayar Pajak? Studi Reformasi Birokrasi di Rumahsakit Bantul DIY." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 1(2):1–7.